



**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
( L K j I P )**

**2020**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BONE**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020 ini, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa setiap perangkat Daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi .

Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone merupakan Indikator sasaran yang dijabarkan menjadi Indikator yaitu :

### 1. Meningkatnya produksi perikanan dengan Indikator

- Persentase peningkatan produksi perikanan Tangkap (%)
- Persentase peningkatan produksi nilai Perikanan Tangkap (%)
- Persentase peningkatan produksi Perikanan Budidaya (%)
- Persentase peningkatan produksi nilai Perikanan Budidaya

### 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi Sakip oleh APIP

Dalam pelaksanaan tugasnya tahun 2020 Dinas Kelautan dan perikanan kab Bone ditunjang oleh 2 sasaran ,4 Indikator Kinerja Utama, 9 Program dan 27 kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja oleh masing masing indikator ada diantaranya yang tidak mencapai target akibat karena Realokasi /refocusing anggaran bahkan ada yang melebihi target. Sedangkan realisasi keuangan dari target Rp.9.723.674.401 terelasisi Rp.9.448.422.882 atau sebesar 98,18 % yang terdiri dari :

1. Belanja Barang Jasa Rp. 4.789.781.824 Realisasi 4.664.115.807, Atau 97,46 %
2. Belanja Modal Rp. 30.000.000 realisasi Rp. 30.000.000 atau 100 %
3. Belanja Pegawai Rp. 4.903.892.577 Realisasi Rp. 4.754.307.075 atau 96,95 %

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan yang mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone Tahun 2020 nantinya akan terus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih optimal.

Watampone, Februari 2021



**Dr. H. BAHARUDDIN, M.Si**

Pangkat Pembina Tk I

NIP. 196312311989031175

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan informasi serta menjadi bentuk Pelaporan mengenai pencapaian Kinerja ( Performant Result ) tahun 2020. Pengukuran Kinerja dalam masing – masing indikator Kinerja input (masukan ), out put ( keluaran ) dan outcome ( hasil) yang menjadi satu bentuk capaian kinerja.

Disamping itu, Akuntabilitas Kinerja harus menyajikan penjelasan antara Realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Harapan kami , kiranya LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020 ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik ( Good Public Governance) menuju Good Governance dan Clean Governance.

Watampone, Februari 2021

Kepala Dinas



**Ir. H. BAHARUDDIN, M.Si**

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 196312311989031175

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambar Umum Organisasi	2
1.4. Isu Strategi	15
1.5. Inovasi Pelayanan Publik	16
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
2.3. Indikator Kinerja Utama	23
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2020	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Capaian Ikhtisar Kinerja Utama	32
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja	34
3.4. Perbandingan Target dan Realisasi	44
3.5. Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja	46
3.6. Realisasi Anggaran	47
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Struktur pegawai menurut tingkat pendidikan	11
Tabel 1.2. Struktur Diklat PIM	11
Tabel 1.3. Jumlah Jabatan Struktural	12
Tabel 1.4. Struktur pegawai menurut kepangkatan dan golongan	12
Tabel 1.5. Distribusi Sumber Daya Pegawai	13
Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana DKP Bone	14
Tabel 2.1. Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Bone	19
Tabel 2.2. Sasaran, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Bone	20
Tabel 2.3. Program untuk pencapaian sasaran tahun 2020 Dinas Kelautan dan perikanan kab. Bone	20
Tabel 2.4. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020	21
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Eselon III DKP Bone tahun 2020	22
Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama DKP Tahun 2020	23
Tabel 2.7. Indikator Kinerja Utama DKP Tahun 2020	24
Tabel 2.8. Belanja DKP Tahun 2020	24
Tabel 2.9. Alokasi Persasaran DKP Tahun 2020	26
Tabel 3.1. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama	33
Tabel 3.2. Realisasi capaian program Pengembangan Perikanan Tangkap	35
Tabel 3.3. Realisasi capaian program pengembangan	36
Tabel 3.4. Realisasi capaian program terhadap sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan	37
Tabel 3.5. Realisasi capaian program pengembangan kawasan Budidaya Laut, payau, dan tawar	37
Tabel 3.6. Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya	39

Akuntabilitas Kinerja rusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone tahun 2020

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja dan Kegiatan Tahun anggaran 2020 yang menunjang pencapaian kinerja per indikator	39
Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	40
Tabel 3.9. Analisis program dan kegiatan tahun anggaran 2020 yang menunjang pencapaian kinerja per indikator	43
Tabel 3.10. Keterkaitan program terhadap capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan	44
Tabel 3.11. Keterkaitan program terhadap capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone	9
Gambar 2. Komposisi SDM PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	14

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. 1. LATAR BELAKANG**

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintahan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIP dilakukan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun. LAKIP dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah selama satu tahun anggaran.

Salah satu dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berupa laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas seobjektif mungkin mengenai tingkat pencapaian kinerja, sasaran, program, kegiatan dan indikator baik keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Sejalan dengan makna Good Governance dimaksud, kebijakan umum pemerintah diarahkan untuk mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya, serta berorientasi pada hasil (outcome). Untuk mencapai sasaran yang dimaksud dikembangkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur yang diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan yang berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan, Negara dalam keadaan darurat dengan adanya pandemi covid 19 sehingga dilakukan refocusing anggaran sebagaimana yang diamanatkan oleh instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing kegiatan,

## **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020**

---

Realokasi Anggaran serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid19), sehingga hal ini mengakibatkan adanya indicator kinerja yang dapat dicapai.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) kepada bupati Bone. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bone untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana startegis (Renstra) dan disusun pada tahun 2018- 2023.

### **1. 2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2020 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dinas atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja daerah yang sudah diperjanjikan.
- Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun 2020 adalah:
  1. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat, dan objektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2020 baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
  2. Memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, dan juga sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja pada priode yang akan datang.

### **1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone**

##### **1.3.1.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan daerah;
- b. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan daerah kepada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan kepada

- Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
  - f. Penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Adapun tugas dan fungsi satu eselon di bawah kepala dinas diuraikan sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;

- a. Pengkoordinasian tugas-tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Kelautan dan Perikanan;
- b. Penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- d. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan pembinaan staf; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **2. Bidang Kenelayanan**

Bidang Kenelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Kenelayanan. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan memfasilitasi program Bidang Kenelayanan;
- b. Perencanaan Program Bidang kenelayanan;

- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan diklat dan pendampingan nelayan, iptek, dan informasi kenelayan serta pembinaan kelembagaan nelayan;
- d. Pengevaluasian dan melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Kenelayan;
- e. Pelaporan laporan kinerja Bidang Kenelayan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan**

Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan;
- b. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Diklat dan Pendampingan Pembudidayaan Ikan, Akses Iptek dan Informasi Pembudidayaan Ikan, Pembinaan Kelembagaan dan Pembudidayaan Ikan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan;
- d. Pelaksanaan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Jasa Usaha Perikanan**

Bidang Jasa Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memfasilitasi jasa usaha perikanan. Bidang Jasa Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program Bidang Jasa Usaha Perikanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Penerbitan TPUPI dan TPKPIH dan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Jasa Usaha Perikanan;

- d. Pelaksanaan laporan kinerja Bidang Jasa Usaha Perikanan;
- e. Pemberian rekomendasi dan layanan perizinan usaha Pembudidayaan ikan, penerbitan TPUPI dan TPKPIH dan Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- b. Pelaksanaan pembinaan kawasan perikanan budidaya, Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, Teknologi Budidaya dan produksi;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- d. Pelaksanaan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugasnya.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh 2 (dua) UPTD yakni UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lonrae dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI). Namun seiring dengan perubahan regulasi, 2 (dua) UPTD tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone membentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) kelas A dengan tugas dan fungsi sebagai berikut

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan dan Pengembangan Budidaya (BBIPB)
  - (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan pengelolaan UPT Balai Benih Ikan dan Pengembangan Budidaya.
  - (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembenihan dan percontohan budidaya ikan air tawar, uji laboratorium tentang kesehatan ikan dan lingkungan;
  - b. Pelaksanaan promosi dan penjualan benih dan calon induk ikan air tawar serta ikan konsumsi dengan teknologi cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
  - c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pembenihan, percontohan budidaya ikan air tawar dengan teknologi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) serta uji laboratorium tentang kesehatan ikan dan lingkungan kepada dinas;
  - d. Pelaksanaan kerjasama dengan bidang terkait.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan struktur yang terdiri dari :
- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan pengelolaan UPT Tempat Pelelangan Ikan.
  - (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi:
    - a. Pelaksanaan pelelangan dan pemasaran ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
    - b. Penanganan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan;
    - c. Pelaksanaan tugas koordinasi dengan koordinator wilayah kerja TPI yang ada di kecamatan;
    - d. Pengumpulan dan pengolahan data produksi hasil penangkapan ikan di TPI;
    - e. Pelaporan hasil penyelenggaraan TPI kepada kepala dinas;
    - f. Pelaksanaan tugas pembantuan atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

### **1.3.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk kategori tipe A dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari :

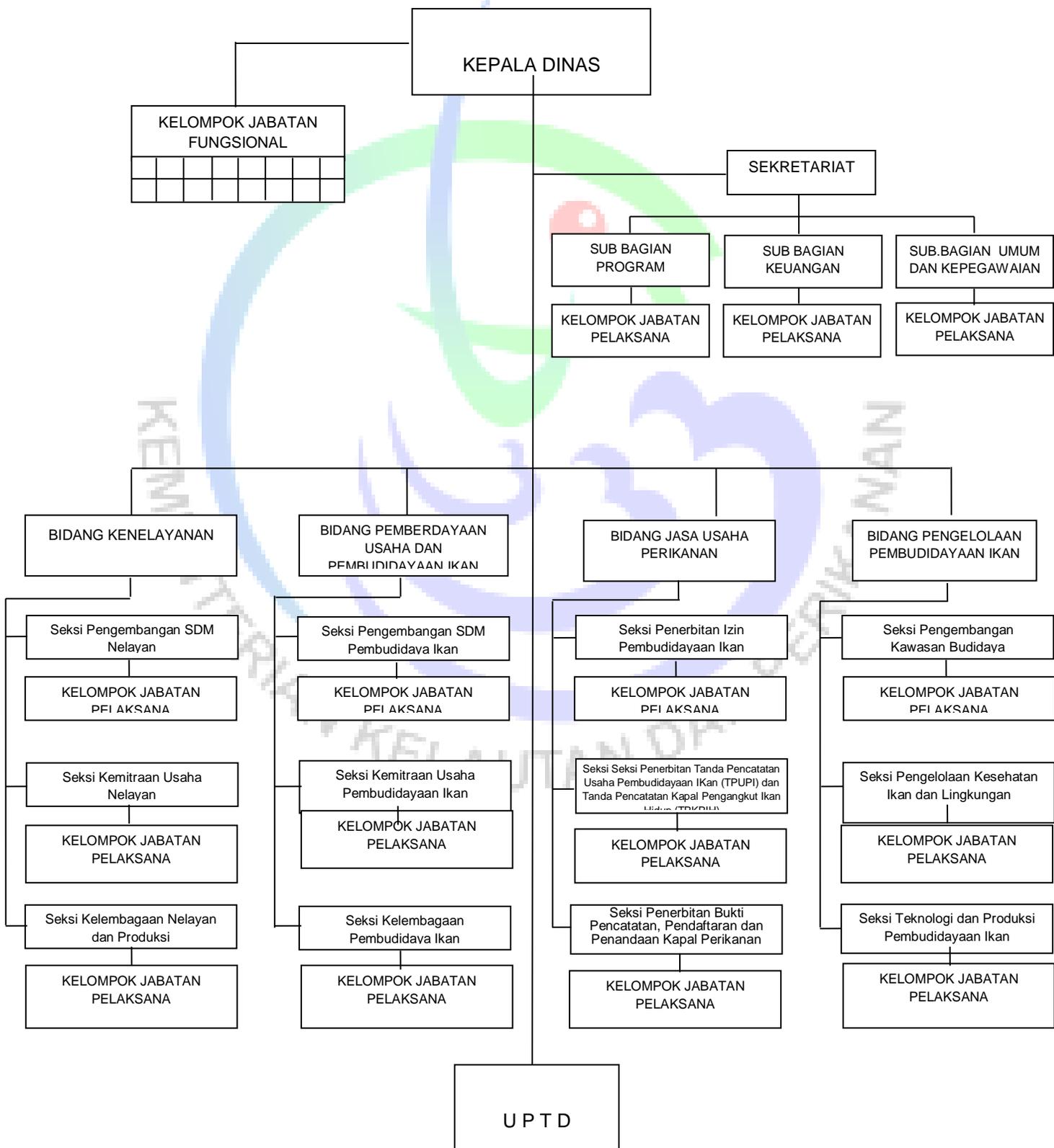
- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris, dengan 3 sub bagian,
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Kenelayanan, dengan 3 seksi,
  - Seksi Pengembangan SDM Nelayan
  - Seksi Kemitraan Usaha Nelayan
  - Seksi Kelembagaan Nelayan dan Produksi
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 seksi,
  - Seksi Pengembangan SDM Pembudidaya Ikan
  - Seksi Kemitraan Usaha Pembudidayaan Ikan
  - Seksi Kelembagaan Pembudidaya Ikan
- e. Kepala Bidang Jasa Usaha Perikanan, dengan 3 seksi,
  - Seksi Penerbitan Izin Pembudidayaan Ikan
  - Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH)
  - Seksi Penerbitan Bukti Pencatatan, Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan 3 seksi,
  - Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya
  - Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  - Seksi Teknologi dan Produksi Pembudidayaan Ikan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan dan Pengembangan Budidaya (BBIPB) dengan struktur yang terdiri dari :
  - Kepala UPT;
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan struktur yang terdiri dari :
  - Kepala UPT
  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
  1. Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelas dari struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka dapat dilihat pada skema berikut ini

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone



Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja ( SOTK) Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami perubahan menjadi Dinas Perikanan, hal ini mengacu kepada Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kab Bone sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 3 sub bagian
  - Sub bagian Program
  - Sub bagian Keuangan
  - sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kenelayanan dengan 3 bagian Seksi
  - Data, Informasi dan Pengembangan SDM Nelayan
  - Kemitraan Usaha Perlindungan Nelayan dan Pemantauan Sumberdaya
  - ikan Perairan Darat
  - Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kenelayanan
4. Bidang Pengembangan Budidaya Air Tawar dengan 3 bagian Seksi
  - Data, Informasi dan Pengembangan SDM Budidaya Air Tawar
  - Kemitraan Usaha Pemantauan dan Perlindungan Budidaya Air Tawar
  - Kelembagaan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar
5. Bidang Pengembangan Budidaya Air Payau dengan 3 bagian Seksi
  - Data, Informasi dan Pengembangan Budidaya Aior Payau
  - Kemitraan Usaha Pemantauan dan Perlindungan Budidaya Air Payau
  - Kelembagaan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Payau
6. Bidang Pemberdayaan Usaha dan Daya Saing dengan 3 Seksi
  - Data, Informasi Pengembangan SDM pengolah dan Pemasar
  - Kemitraan Usaha Pemantauan dan Perlindungan Pengolah dan Pemasar
  - Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasar.
7. UPT. PPI Lonrae dan UPT BBI- Amali

**1. 3. 3 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, saat ini didukung oleh :

**a. Tingkat Pendidikan**

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2020 tercatat sebanyak 53 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	S3	-	-	-
2.	S2	12	7	19
3.	S1	13	10	23
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	SLTA	5	3	8
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>53</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2020

**b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon**

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel.1.2.  
Struktur Diklat PIM

No.	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Diklat PIM II	-	1	1
2.	Diklat PIM III	3	1	4
3.	Diklat PIM IV	6	12	18
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2020

Tabel.1.3.  
Jumlah Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	7	12	19
	Jumlah	11	14	25

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2020

**c. Pangkat dan Golongan**

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone bervariasi dari Golongan II sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut :

Tabel.1.4.  
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	-	1	1
3	Golongan IV/b	1	-	1
4	Golongan IV/a	3	4	7
5	Golongan III/d	4	10	14
6	Golongan III/c	5	5	10
7	Golongan III/b	2	-	2
8	Golongan III/a	4	6	10
9	Golongan II/d	2	-	2
10	Golongan II/c	2	1	3
11	Golongan II/b	-	1	1
12	Golongan II/a	-	2	2
13	Golongan I/d	-	-	-
14	Golongan I/c	-	-	-
15	Golongan I/b	-	-	-
16	Golongan I/a	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2020

**d. Distribusi Sumberdaya Pegawai**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone terdiri atas 4 bidang teknis, Sekretariat. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel. 1.5  
Distribusi Sumberdaya Pegawai

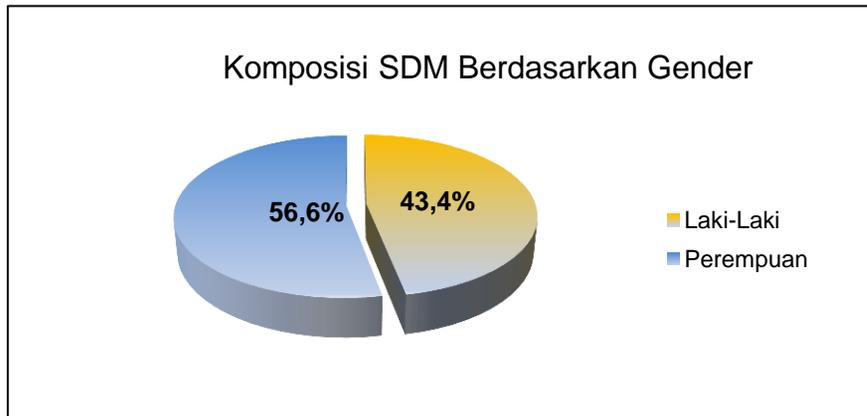
No.	Bidang / Unit	PNS		Jumlah	Tenaga Kontrak		Jumlah
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1.	Kenelayanan	3	5	8	1	2	3
2.	Pemberdayaan Usaha dan Pembudidaya Ikan	1	8	8	-	2	2
3.	Jasa Usaha Perikanan	7	2	9	-	1	1
4.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3	6	8	1	1	2
5.	Sekretariat	5	9	14	3	5	8
6.	UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	-	3	15	-	15
7.	UPT BBI dan Pengembangan Budidaya	2	-	2	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2020

Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki sebanyak 23 orang
- Perempuan sebanyak 30 orang

Gambar 2. Komposisi SDM PNS berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone Tahun 2020

**1. 3. 4. Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone**

Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 1.6  
Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

No.	Sarana dan Prasarana yang digunakan	Kondisi		Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik		
1.	Mobil Operasional	Ya		4 Unit	
2.	Motor Operasional	Ya		74 Unit	
3.	Komputer PC	Ya		13 Unit	
4.	Laptop/Notebook	Ya		14 Unit	
5.	Meja Kerja	Ya		36 Buah	
6.	Kursi Kerja	Ya		65 Buah	
7.	Mesin Ketik	Ya		7 Unit	
8.	AC	Ya		15 Unit	
9.	Printer	Ya		13 Unit	
10.	Kantor Operasional			3 Unit	Kantor Dinas, UPT TPI dan UPT BBIPB

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

- a. Lemahnya kemampuan pelaku usaha dibidang kenelayan dalam kemandirian berwirausaha. Perikanan tangkap merupakan sub sektor yang memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi perikanan Kabupaten Bone. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha di bidang penangkapan ikan antara lain masih lemahnya kemampuan nelayan dalam kemandirian usaha terutama akses terhadap permodalan, akses informasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi penangkapan ikan. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah masih tinggi dalam hal pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan ikan maupun akses informasi dan penerapan teknologi penangkapan ikan.
- b. Masih rendahnya kemampuan berwirausaha bagi pembudidaya ikan secara berkelanjutan. Permasalahan potensi lahan budidaya (tambak, kolam, sawah dan perairan umum) masih belum dikelola secara optimal. Persoalan utama terkait pengembangan budidaya perikanan antara lain kondisi sarana dan prasarana budidaya yang belum memadai, masih rendahnya pemahaman dan penerapan cara budidaya ikan yang baik serta kurangnya kemampuan pembudidaya dalam mengakses permodalan.
- c. Rendahnya legalitas berusaha bagi usaha perikanan. Legalitas berusaha di sektor perikanan secara umum terbagi 2 (dua) yaitu Pertama, legalitas kelompok yang meliputi Pengukuhan Kelompok, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Badan Hukum (Akta Notaris dan Pendaftaran di Kemenkumham). Kedua, Legalitas Perizinan Berusaha yang meliputi Izin Usaha (SIUP atau Tanda Daftar Usaha bagi pelaku usaha kecil) maupun Izin Operasional / Komersial seperti SIPI / SIKPI atau dokumen lain pengganti SIPI / SIKPI bagi nelayan kecil. Permasalahannya selama ini, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha perikanan tentang pentingnya mengurus legalitas berusaha masih sangat rendah
- d. Adanya COVID -19 sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya target kinerja karena beberapa anggaran direalokasi/refocusing.

### **1.5. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pelayanan terpadu di PPI Lonrae untuk memudahkan nelayan dalam pengurusan kelengkapan perizinan dalam melakukan pelayaran untuk menangkap ikan di laut. dalam pelayanan terpadu ini terdiri dari tenaga Kesehatan, tenaga dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Syahbandar Perikanan.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 menjadi dasar Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Bone.

##### **2.1.1. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Sebagaimana telah diketahui bupati dan wakil bupati terpilih telah mencanangkan visi dan misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah :

Visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yaitu:

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023, misi yang ditempuh sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Misi 3: Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
- Misi 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- Misi 5 : Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- Misi 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 tersebut, sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi pada pencapaian Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Misi 5 : Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi sektor Perikanan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

### **2.1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta Isu Utama di Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

Adapun Rumusan Tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja dan Target Kinerja untuk masing – masing tujuan strategis diuraikan dalam table sebagai berikut:

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir	Target Kondisi (Peningkatan Target T-1 ke Tn)
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan	- Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	3	6	1
		- Presentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	1,2	1,8	
		- Presentase peningkatan produksi perikanan Budidaya	%	5	8	1
		- Presentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	%	1,2	1,8	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B	BB	

### 2. 1.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara teratur yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Tabel 2.2. Sasaran, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	- Presentase peningkatan produksi perikanan Tangkap	%	3	6
		- Presentase peningkatan nilai produksi perikanan Tangkap	%	1,2	1,8
		- Presentase peningkatan produksi perikanan Budidaya	%	5	8
		- Presentase peningkatan nilai produksi perikanan Budidaya	%	1,2	1,8
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B	BB

### 2. 1. 4. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya dijabarkan lebih sistematis melalui perumusan program- program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2020 sebagai berikut:

Table 2.3. Program untuk pencapaian sasaran tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone

Sasaran	Program Pendukung
- Meningkatkan Produksi Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap</li> <li>2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>3. Program Pengembangan Perikanan Budidaya</li> <li>4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</li> <li>5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> </ol>

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Sasaran	Program Pendukung
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 9. Program Penunjang Pemerintahan Umum

### 2. 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja serta program dan anggaran penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2020, IKU dan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah menetapkan PK 2020 sebagai berikut:

Tabel ; 2.4.Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2020	Sumber Data
1.	Meningkatnya produksi perikanan	- Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap - Presentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap - Presentase peningkatan produksi perikanan Budidaya - Presentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	% % % %	3 1,2 5 1,2	Renstra 2018-2023
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B	Hasil Review oleh APIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Eselon III Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone  
Tahun 2020.

No.	Program	Indikator	Satuan	Target
1.	Program Pengembangan perikanan tangkap	- Produksi perikanan tangkap - Jumlah Produksi Kelompok Nelayan	Ton Ton	49.112,29 34.378,61
2.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	- Presentase Jumlah Nelayan yang terberdayakan. - Persentase jumlah usaha pembudidayaan ikan yang terfasilitasi	% %	100 100
3.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	- Produksi Perikanan Budidaya - Jumlah produksi pokdakan	Ton Ton	389.731.19 274.483
4.	Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	- Presentase jumlah pengembangan kawasan berbasis kluster	%	100
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP - Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran	Predikat %	B 100
6.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP - Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Predikat %	B 100
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	- Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP - Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Predikat %	B 100
8.	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP - Cakupan realisasi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat %	B 100
9.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	- Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

		- Cakupan pemerintahan umum penunjang		
		- Cakupan realisasi produk perikanan promosi	%	100

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Table 2.6. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya produksi perikanan	- Persentase peningkatan produksi perikanan tangka	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Akhir}} \times 100$
		- Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Akhir}} \times 100$
		- Persentase peningkatan produksi perikanan Budidaya	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Akhir}} \times 100$
		- Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	%	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Akhir}} \times 100$
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	Nilai yang diperoleh sama di Evaluasi

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Adapun target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 seperti pada tabel sebagai berikut :

Table 2.7. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya produksi perikanan	- Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	3
		- Presentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap	%	1,2
		- Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	5
		- Presentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan	%	1,2
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B

### 2. 4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020, maka jumlah anggaran yang dibelanjakan adalah sebesar **Rp. 9.623.297.877**. Secara rinci Anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 2.8 Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	%
1.	Belanja Tidak langsung	<b>4.903.892.577</b>	50,96
	• Belanja Pegawai	<b>4.903.892.577</b>	
2.	Belanja Langsung	4.689.405.300	49,04
	• Belanja barang dan jasa	30.000.000	
	• Belanja Modal		
Jumlah		<b>Rp. 9.623.297.877</b>	100

## **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020**

---

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut.





**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	%
				9. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Rp. 1.745.063.000	
				10. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan	Rp. 11.550.000	
				11. Pengembangan UPTD Pembinaan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan	Rp.43.886.000	
				12. Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Perikanan	Rp.5.950.000	
				13. Pembinaan Sumberdaya Manusia Pembudidaya Pengolah dan Pemasar Ikan	Rp. 2.900.000	
			IV. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar		<b>Rp.777.500.000</b>	
				14. Kajian Kawasan Budidaya bLaut,Air Payau dan Air Tawar	Rp.777.500.000	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<b>Rp. 685.774.000</b>	20,00

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	%
				15. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Rp. 105.902.061	
				16. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.000.000	
				17. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 2.589.500	
				18. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 15.000.000	
				19. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 123.346.000	
				20. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp. 90.139.000	
				21. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp. 338.797.439	
			VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<b>Rp. 226.111.500</b>	
				22. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 30.000.000	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	%
				23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala /Gedung Kantor	Rp. 20.565.500	
				24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala/Kendaraan Dinas Operasional	Rp. 175.546.000	
			VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		<b>Rp. 3.800.000</b>	
				26. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	3.800.000	
			VIII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<b>Rp. 6.200.000</b>	
				27. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.200.000	
			IX. Program Penunjang Pemerintahan Umum		<b>Rp. 19.650.000</b>	
				28. Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Rp. 19.650.000	
				29. Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan	Rp.0	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>4.719.405.300</b>	<b>100</b>

Dari Tabel 2.9 tersebut di atas jumlah anggaran untuk Program dan Kegiatan sebesar **Rp. 4.719.405.300**. Anggaran tersebut yang mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan persentase 80 %, kemudian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan dengan persentase 20 %.

Anggaran terbesar yang mendukung sasaran meningkatnya produksi perikanan yaitu pada program Pengembangan Perikanan Tangkap pada kegiatan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap dengan Indikator kegiatan jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dan jumlah kelompok nelayan yang memperoleh pendampingan /penguatan kelembagaan. program ini banyak memberikan bantuan ke kelompok (KUB) seperti pengadaan alat tangkap ramah lingkungan, disusul , program pengembangan budidaya perikanan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan dengan indikator kegiatan jumlah pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan penerapan CBIB , termasuk program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar juga memberikan kontribusi dalam hal pengembangan kawasan yang berbasis klaster budidaya laut, payau dan air tawar.



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020 di ukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja atau penetapan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian Target Kinerja yang dilakukan dalam dokumen/lembar Perjanjian Kinerja. Pengukuran Capaian Kinerja target kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020;
2. Membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020, 2019, dan 2018;
3. Membandingkan realisasi kinerja dan target akhir RENSTRA
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Target efisiensi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai capaian kinerja sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sasaran, semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja (output) maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Sementara

semakin banyak output (anggaran) yang dikeluarkan maka tingkat efisiensi semakin rendah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2020 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil produksi capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%.

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3. Cara penyimpanan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian atau capaian indikator kinerja sasaran.

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- >100 = Baik Sekali
- 76 – 100 = Baik
- 66 - 73 = Cukup
- 57 - 65 = Kurang

### **3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada Tabel berikut.

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Tabel 3.1. capaian pengukuran indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya produksi perikanan	- Persentase peningkatan produksi perikanan tangka	%	1,0021
		- Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	%	1,22
		- Persentase peningkatan produksi perikanan Budidaya	%	1.0002
		- Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya	%	1,21
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	Belum direviw oleh Apip

Berdasarkan tabel diatas capaian pengukuran indikator kinerja utama pada sasaran 1. Meningkatkan Produksi Perikanan terlihat bahwa indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Tahun 2019 target 2% sementara Tahun 2020 target 3 % artinya terjadi peningkatan 1% dari Tahun2019 ke 2020. Target Produksi perikanan Tangkap berdasarkan Renstra 2018-2023 sebesar 49.112,29 ton dan realisasi produksi tahun 2020 sebesar 49.604,46 ton . Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan 1.0021 % sehingga capaian tahun 2020 sebesar 100.21 %. Dan Persentase peningkatan nilai produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar Rp 804.652.700 dibanding dengan tahun 2019 sebesar Rp. 794.847.902 artinya terjadi kenaikan 1,22 % dari target 1,2% sehingga capaian nilai produksi 101,7 % .

Sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2019 Target 4 % dan target tahun 2020 yaitu 5 % artinya terjadi peningkatan 1% tahun 2020. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2020 dengan target renstra 389.731,19 realisasi 393.668,61 atau 101,01%. sehingga capaian kinerja sebesar 100,02% sedangkan Peningkatan nilai produksi perikanan budidaya Tahun 2020 target 1,2 % dengan realisasi 1,2117 % atau capaian kinerjanya sebesar 100.97%

Sasaran 1 Meningkatnya produksi Perikanan , baik produksi perikanan Tangkap maupun produksi perikanan budidaya mencapai target untuk tahun 2020.

Sasaran II. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan pada indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan target B, realisasi B dengan nilai 69,5. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan telah memenuhi kriteria dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dalam hal akuntabilitas kinerja mulai pada saat perencanaan sampai pada pelaporan pelaksanaan kegiatan.

### **3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone Tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja maka untuk mengevaluasi sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan ,dapat diketahui dengan melihat indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan format pengukuran capaian kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada indikator kinerja utama RPJMD Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dijelaskan melalui tiap sasaran berikut dibawah ini.

a. Sasaran 1 : Meningkatnya produksi Perikanan.

- Starategi : Peningkatan kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan, kapasitas kelembagaan kelompok dan pola kemitraan pelaku usaha perikanan melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan dan rekomendasi.
- Kebijakan :
  - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan penguasaan teknologi pelaku usaha perikanan.
  - Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan dan pembudidaya ikan
  - Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan
  - Penguatan fasilitasi pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan
  - Peningkatan pelayanan UPT-TPi dan UPT BBI
  - Peningkatan upaya pemantauan terhadap kesehatan ikan dan lingkungan pembudidaya ikan

- Penyusunan masterplant pengelolaan kawasan budidaya perikanan, penetapan klaster yang berbasis kawasan dan penyediaan data base pembudidaya ikan.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

- Strategi : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana prasarana pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Kebijakan :
  - Memberikan kecukupan pemenuhan jasa Listrik dan air untuk mendukung administrasi perkantoran.
  - Melakukan kecukupan bahan, jasa, dan alat kelengkapan perkantoran.
  - Melakukan pelayanan administrasi keuangan dan perkantoran yang transparansi dan akuntabel
  - Mendorong pengadaan mutu sarana dan prasarana pendukung perkantoran.
  - Mendorong kemampuan sumberdaya aparatur
  - Memberikan informasi kinerja smart
  - Melakukan penyusunan perencanaan, publikasi penyelenggaraan OPD dan promosi produk perikanan.

**3.3.1. Perbandingan antara target dan realisasi terhadap sasaran Pertama**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja **“Meningkatnya Produksi Perikanan”** diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Terhadap Sasaran Pertama.

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1	1,0021	100,21
		Persentase Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	1,2	1,22	101,7

		Persentase Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1	1,0002	100,02
		Persentase Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya	1,2,	1,21	100,8

Perbandingan antara target dan realisasi terhadap sasaran pertama yaitu meningkatnya produksi perikanan pada indikator Persentase jumlah produksi perikanan tangkap terlihat bahwa dari data realisasi mengalami kenaikan 1,0021 % dengan capaian 101,21 % sementara jumlah Nilai produksi perikanan tangkap juga mengalami kenaikan 1,22%.dengan capaian 101,7 % terjadinya kenaikan produksi pada 2 indikator tersebut salah satu penyebab karena adanya bantuan sarana dan prasarana yang diberikan kepada kelompok nelayan ( KUB) baik yang sumber dana nya dari APBD ( DAK-DAU) maupun bantuan yang dari APBD Propinsi dan APBN dengan tujuan peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan para nelayan. Jumlah nilai produksi perikanan tangkap melampaui target dimana harga jual yang tinggi.

Sasaran meningkatnya Produksi Perikanan pada indikator produksi perikanan Budidaya terlihat bahwa realisasi produksi mengalami kenaikan 1,0002 % dengan capaian 100,02 % dan indikator jumlah Nilai produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan 1,21% dari target yang ditentukan.dengan capaian 100,8 %..

### 3.3.2.Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		
			2018	2019	2020
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	46.746,9	48.341,319	49.604,46
		Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap		794.847.902	804.652.700
		Jumlah Produksi Perikanan	356.896,90	377.183,7	393.668,61

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

		Budidaya			
		Jumlah Nilai		2.982.230.042	3.018.367.045
		Produksi Perikanan Budidaya			

Berdasarkan Tabel tersebut pada sasaran 1. Meningkatnya produksi perikanan merupakan perbandingan dari tahun 2018 s/d 2020. Dari table tersebut mengalami peningkatan produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya. Tahun 2018 sampai tahun 2020 dari target yang ada berdasarkan Renstra 2018-2023 mengalami capaian atau peningkatan dari tahun ketahun realisasinya melampaui target yg ada. Salah satu penyebab meningkatnya produksi dari tahun 2018 sampai 2020 adanya bantuan ke kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya dalam bentuk barang yang diserahkan ke kelompok pembudidaya dan kelompok nelayan berupa pengadaan kapal/perahu, alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dempon /percontohan baik untuk budidaya air tawar, payau dan polykultur. yang sumber dananya dari APBD (DAK-DAU), APBD TK I dan APBN disamping itu nelayan dan pembudidaya tetap melaksanakan aktivitasnya dengan tetap memperhatikan CPIB dan CBIB dengan tujuan peningkatan produksi untuk kesejahteraan keluarga.

### 3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir Renstra

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator	Target	Tahun 2020			
				Target akhir Renstra	Peningkatan Target T-1ke Tn	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3 (1)	6	3	1,002	100,2
		Persentase Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	1,2	1,8		1,22	101,7
		Persentase jumlah	5 ( 1)	8	3	1,0002	100,02

		Produksi perikanan Budidaya					
		Persentase Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1,2			1,21	100,8

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target akhir ranstra terhadap sasaran pertama menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata 100%.

### **3.3.4. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 9 program 31 kegiatan yaitu ;

#### **1. Program Pengembangan perikanan tangkap**

Target Produksi perikanan tangkap berdasarkan renstra 2018-2023 tahun 2020 adalah 49.112,29 ton dengan realisasi produksi 49.604,46 ton atau 101,002 % .Produksi perikanan tangkap melebihi target yang ditetapkan salah satu penyebab adanya bantuan kapal/perahu dan alat bantu penangkapan ikan kepada kelompok dimana para nelayan tetap melakukan aktivitas sekalipun dalam kondisi pandemic Covid 19.

Dinas Kelautan dan perikanan Kab Bone Tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan pembinaan kelompok nelayan perikanan yang sumber dana dari DAK berupa pengadaan belanja yang diserahkan kepada masyarakat yaitu ;

- Pengadaan Kapal/Perahu Penangkap ikan beserta mesin alat Penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di desa Malimongeng Kecamatan Mare dengan anggaran 788.400.000 Realisasi Rp. 782.712.000, sebanyak 24 Paket. Sisa Kas anggaran merupakan sisa tender sebesar Rp. 5.948.000,-

Disamping Dana DAK juga ada Pengadaan yang sumber Dananya dari DAU yaitu pengadaan kapal perahu 2 paket di Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 140.000.000 realisasi 139.850.000 sisa Kas anggaran dikembalikan ke KASDA.

Tabel 3.6. Realisasi Capaian Program Pengembangan Perikanan Tangkap Terhadap Sasaran I, Meningkatnya Produksi Perikanan

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Predikat
	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>Rp. 1.796.789.500</b>	<b>Rp. 1.759.890.500</b>	97,95	Baik
1.	Kegiatan pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap	Rp. 35.350.000	Rp. 5.350.000	100	Baik
2.	Kegiatan pembinaan nelayan perikanan tangkap	Rp. 1.745.036.000	Rp. 1.738.207.000	99,6	Baik
3.	Pengembangan UPTD, pembinaan dan Mekanisme pengelolaan perikanan tangkap	Rp. 13.053.500	Rp. 12.983.500	99,5	Baik
4.	Pembinaan pendampingan dan pencatatan kapal perikanan	Rp. 3.350.000	Rp.3.350.000	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Program dan Kegiatan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap capaian Realisasinya 97,95 %. Dengan Rincian Kegiatan Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan tangkap realisasi Capaian 100 %, kegiatan Pembinaan Nelayan Perikanan Tangkap realisasi capaian 99,96 %, Kegiatan pengembangan UPTD Pembinaan dan mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap realisasi capaian 99,5 % dan Kegiatan Pembinaan Pendampingan dan Pencatatan Kapal Perikanan realisasi Capaian 100 %.

## 2. Program Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tabel 3.7. Realisasi Capaian Program Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat pesisir Terhadap Sasaran I Meningkatnya Produksi Perikanan

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Predikat
	Program Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	<b>Rp. 60.344.300</b>	Rp.60.344.300	100	Baik
1.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp. 55.944.300	Rp. 55.944.300	100	Baik
2.	Kegiatan Pembinaan Izin Usaha Pembudidayaan	Rp. 1.650.000	Rp. 1.650.000	100	Baik

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Ikan				
3. Kegiatan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000	100	Baik

Realisasi Capaian Program pada Program Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 100 % yang terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir , Kegiatan Pembinaan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan dan Kegiatan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil.

### 3. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Target produksi perikanan budidaya untuk Tahun 2020 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah 389,731,19 (ton). Realisasi produksi Budidaya Tahun 2020 adalah 393.668,61 Ton atau 101,01%.

Tabel 3.8. Capaian Program/kegiatan Terhadap Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone Tahun 2019

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Predikat
I.	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>Rp. 1.844.672.000</b>	<b>Rp. 1.837.808.000</b>		Baik
	1. Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya Ikan	Rp.35.350.000	Rp. 35.350.000	100	Baik
	2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Rp. 1.745.036.000	Rp.1.738.207.000	99,6	Baik
	3. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kemitraan Pembudidayaan Ikan	Rp. 11.550.000	Rp. 11.550.000	100	Baik
	4. Pengembangan UPTD pembinaan dan mekanisme pengolahan budidaya perikanan	Rp.43.886.000	Rp. 43.851.000	99,9	Baik
	5. Pembinaan sumber daya manusia pembudidaya , pengolah dan pemasar Ikan	Rp. 2.900.000	Rp.2.900.000	100	Baik
	6. Pembinaan dan pengembangan kesehatan dan Lingkungan Perikanan	Rp. 5.950.000	Rp. 5.950.000	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Program Terhadap Sasaran I meningkatkan Produksi Perikanan untuk tahun 2020 capaian kinerjanya antara 99,6 % - 100 %.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan

Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan dengan indikator kegiatan jumlah pokdakan yang memperoleh pendampingan /penguatan kelembagaan dengan sasaran 10 (sepuluh) kelompok pembudidayaan ikan atau pokdakan. Pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada kelompok pembudidayaan ikan air tawar/minapadi, melaksanakan temu lapang budidaya air tawar dan melakukan sosialisasi program Gerakan makan ikan di Desa Pallae Kecamatan Cenrana.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan budidaya

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan dengan indikator kegiatan yaitu jumlah pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan penerapan CBIB dengan sasaran kelompok pembudidaya ikan dan target 20 pokdakan . Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan terdiri atas dua (2) sumber dana yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)., dimana Dana yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.482.186.000,- berupa percontohan ( Dempon ) yang diserahkan kepada kelompok dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

- a. Paket percontohan Budidaya Udang Sederhana pada lokasi Desa Watu kecamatan Barebbo dan Desa Carigading Kecamatan Awangpone sebanyak 8 Unit dengan jumlah anggaran Rp.400.000.000 dan realisasi Rp. 397.540.000.
- b. Paket percontohan Nila di kolam pada lokasi Desa Sanrego, Desa Cenrana Kecamatan Kahu sebanyak 4 Unit dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dan Relisasi 199.562.000.
- c. Paket percontohan budidaya nila dengan padi (Mina padi) pada lokasi Desa Mattampawalie Kec. Lapri, Desa Mamminasae Kec. Lamuru dan Desa Tocina,Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe sebanyak 10 Unit dengan anggaran Rp.390.000.000.
- d. Paket percontohan polykultur udang, bandeng dan rumput laut di lokasi Desa Bulie Kec. Sibulue , Desa Ajanglesse, Cakkeware Kec Cenrana dan Kelurahan palette Kec. Tanete

Riattang Timur sebanyak 10 unit dengan anggaran sebesar Rp. 492.186.000.

Sementara anggaran yang sumber dana dari DAU merupakan kegiatan penunjang dalam bentuk pembinaan /pendampingan, temu lapang CBIB.

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Pembudidaya Ikan dengan indikator kinerja yaitu jumlah pembudidaya yang terfasilitasi dengan mitra , sasaran ke kelompok pembudidaya /pokdakan dengan target 30 pembudaya.

4 .Kegiatan Pengembangan UPTD Pembinaan dan Mekanisme Pengelola Budidaya Perikanan

Kegiatan pengembangan UPT- BBI merupakan satu kegiatan yang mempunyai indikator kegiatan yaitu jumlah benih ikan air tawar yang diproduksi dengan sasaran pada masyarakat pembudidaya. Target bibit ikan yang dihasilkan pada tahun 2020 yaitu 678.367 ekor dengan realisasi sebanyak 517.750 ekor atau 76 % Kegiatan UPT-BBI ini sumber dana dari Dana DAU., hal ini disebabkan karena indukan yang ada sudah kurang produktif lagi sehingga perlu pengadaan indukan baru yang unggul.

5. Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Pengolah dan Pemasar ikan

Kegiatan Pembinaan sumberdaya pengolah dan pemasar ikan bertujuan untuk meningkatkan SDM pembudidaya dengan indikator kegiatan adalah jumlah pembudidaya yang mengikuti penguatan SDM dengan target 30 orang dan terealisasi 30 orang . Kegiatan ini bersumber dari dana DAU dengan kegiatan pelaksanaan melakukan pembinaan/sosialisasi dan pendampingan pada pembudidaya polykultur ( Udang, Bandeng dan Rumput Laut ) disamping itu juga dilakukan kegiatan temu lapang pada pembudidaya air payau., namun tidak terlaksana akibat karena Refocusing anggaran.

6. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Kesehatan dan Lingkungan Perikanan.

Kegiatan pembinaan kesehatan dan lingkungan perikanan dengan indikator jumlah kecamatan lokasi pemantauan kesehatan ikan lingkungan perikanan dengan target 5 Kecamatan dan sasaran masyarakat kelautan dan perikanan.Kegiatan ini bersumber dari dana DAU dengan kegiatan Pembinaan dan penanganan tindak pidana

bidang kelautan dan perikanan sosialisasi forum koordinasi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut tidak terlaksana karena Refocusing anggaran.

#### **4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**

Tabel 3.9. Realisasi Capaian program Pengembangan kawasan budidaya Laut, Payau, dan Tawar

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Predikat
	Program Kawasan Budidaya Laut, Payau, dan Tawar	Rp.777.500.000	Rp.776.667.000	99,99	Baik
	Kegiatan Kawasan Budidaya Laut, Payau, dan Tawar	Rp.777.500.000	Rp.776.667.000	99,99	Baik

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar pada kegiatan kajian kawasan budidaya laut, payau dan air tawar dengan indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan dan pemetaan pengembangan kawasan yang berbasis klaster (budidaya laut, payau dan air tawar) dan jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan di kawasan budidaya.

Kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang sumber dana berasal dari dana DAU dan berkontribusi langsung kepada masyarakat dalam hal pembangunan/Rehab saluran tambak di desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare, Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi di Desa Lamuru Kecamatan Tellusiattinge. Kelurahan Waetuo Kecamatan Tanete Riattang Timur. Selain itu ada juga pengadaan Sapras Budidaya Tambak di Kelurahan WaeTuo di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Bantuan Sarana Prasarana Kawasan Budidaya di desa Pada Tuo Kecamatan Tonra dan Desa Lamuru Kecamatan Tellusiattinge.

**3. 4 Perbandingan antara Target dan Realisasi terhadap sasaran kedua**

Perbandingan antara Target dan Realisasi terhadap sasaran kedua **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.10. Capaian indikator kinerja Terhadap sasaran kedua

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	Belum dievaluasi oleh APIP	Belum dievaluasi oleh APIP

Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan terlihat pada pencapaian nilai rewiu SAKIP yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah ( APIP) dengan nilai 69,5 dengan predikat B tahun 2019, sementara tahun 2020 belum dilakukan rewiu oleh APIP sehingga realisasi dan capaian kinerja pada sasaran kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan dalam hal Akuntabilitas Kinerja mulai pada saat perencanaan sampai pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan.

**3.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun sebelumnya terhadap Sasaran ke dua**

Tabel.3.11 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya Terhadap sasaran kedua Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		
			2018	2019	2020
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B (65,7)	B (65,9)	Belum dievaluasi oleh APIP

Capaian kinerja indikator dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukan bahwa Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan perjanjian kinerja telah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk selanjutnya Dinas perikanan akan

melakukan upaya-upaya lebih giat lagi sehingga pencapaian target dapat lebih tinggi lagi dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel tersebut pada sasaran .II. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja menunjukkan bahwa predikat yang dicapai tahun 2018 memperoleh predikat B..sedangkan tahun 2019 predikat yang dicapai adalah B artinya mengalami peningkatan nilai 65,7 ,yang diperoleh tahun 2019 nilai 69,5 pencapaian 114,2 namun untuk nilai evaluasi sapip tahun 2020 belum dapat disajikan karena pelaksanaan evaluasi sapip oleh APIP baru akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

### **3.4.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Secara umum pencapaian kinerja terhadap kedua sasaran tahun 2020 melebihi hingga 100% meskipun masih sasaran II meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Kelautan dan Perikanan belum dievaluasi juga terdapat target kinerja yang tidak terealisasi akibat karena adanya refocusing anggaran..Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori tinggi..Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab kami maksudkan antara lain ;

1. Adanya komitmen yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2020.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus apa yang akan dicapai., namun karena adanya realokasi anggaran menyebabkan ada target yang tidak tercapai.
3. Telah diimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja dimana setiap anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan outcome.

Penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yaitu ;

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan Dinas.
2. Adanya sinergitas program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementrian .

Adapun penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan alternative solusi yang dilakukan yaitu masih kurangnya sumberdaya manusia (SDM) dibanding dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan,, lemahnya kemampuan pelaku usaha dibidang

kenelayanan dalam kemandirian berwirausaha, Rendahnya legalitas usaha bagi usaha perikanan dan rendahnya kemampuan berwirausaha bagi pembudidaya secara berkelanjutan.

Solusi yang diambil adalah perlunya penambahan SDM yang berkualitas, perlu pembinaan dan sosialisasi tentang teknis peningkatan usaha kelautan dan perikanan. baik kepada nelayan maupun kepembudidaya/pokdakan.

#### **3.4.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran terdiri atas 9 Program 27 Kegiatan sebesar Rp 9.723.674.401. dengan realisasi Rp 4.694.115.807 atau 99 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,7 % berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini sebesar 1,08 %.

### **3. 5. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA**

#### **a. Sasaran 1. Meningkatnya produksi perikanan**

Produksi Perikanan menjadi sasaran utama sektor kelautan dan perikanan baik produksi perikanan Tangkap maupun produksi perikanan budidaya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan dampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah produksi perikanan pada sasaran 1 Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2020 dari target 438.843,34. Ton ( Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ) dengan realisasi 443.273.07 ton atau 101 % melebihi target disebabkan karena adanya , beberapa bantuan yang diberikan ke kelompok Nelayan dan kelompok pembudidaya (Pokdakan) yang sumber dananya bersumber dari anggaran APBD baik DAK maupun DAU. Bantuan yang diberikan ke kelompok berupa pengadaan kapal/perahu , alat penangkapan ikan, bantuan dalam bentuk percontohan/demon dan bantuan lain dalam bentuk sarana prasarana lainnya. Dari capaian kinerja tersebut ada kegiatan yang melebihi target tanpa didukung dengan anggaran , sementara ada kegiatan yang tidak mencapai target karena mengalami refocusing anggaran

#### **b. Sasaran II, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan.**

Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan terlihat pada pencapaian nilai reuiv SAKIP yang telah dilakukan oleh

aparatus pengawas intern pemerintah ( APIP) dengan nilai 69,5 dengan predikat B.

Tabel 3.12. Perbandingan capaian kinerja indikator sasaran II meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan tahun sebelumnya.

No.	Uraian	Tahun Capaian		
		2018	2019	2020
1.	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP	CC	B (69,5)	Belum dievaluasi oleh APIP

### 3. 6 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebesar Rp. **9.723.674.401** dengan rincian Belanja Langsung Rp.5.308.287.860 dan Belanja Tidak Langsung Rp.4.415.386.541. mengalami Refocusing/Realokasi sebesar **Rp.3.725,787.860** dengan Rincian ;Dana Alokasi Khusus ( DAU) sebesar Rp. 2.310.186.000 Dana Alokasi Umum ( DAU ) sebesar Rp. 1.415.601.860 Sehingga anggaran belanja Langsung setelah direalokasi (Parsial 3) sebesar **Rp. 5.997.886.541** terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.582.500.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.415.386.541.Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk percepatan penanganan COVID – 19, namun dalam perjalanan Tahun berjalan anggaran yang difocusing/ direalokasi khususnya Dana DAK dan DAU Fisik dikembalikan 100% dan ada penambahan anggaran Rp.90.000.000 untuk pengadaan kapal/perahu, Total anggaran setelah pengembalian dana yang difocusing / direalokasi sebesar Rp 4.569.405.300 ( Parsial 4).

Pada Tahun 2020 Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone berdasarkan DPA-Perubahan sebesar Rp.4.719.405.300 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.694.115.807 atau 99% , terdapat sisa kas Anggaran sebesar Rp. 25.289.439 merupakan sisa pagu anggaran kegiatan dan telah dikembalikan ke KAS DAERAH.

Program dan Kegiatan Tahun 2020 meliputi :

1. Program pengembangan Perikanan Tangkap dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.095.353.500 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.089.335.500 atau 99,45 % dengan

realisasi Fisik sebesar 100%.. Program ini didukung oleh Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.725.000 realisasi Rp.3.725.000 atau 100% dengan indikator kegiatan Jumlah Nelayan yang terlatih sebanyak 30 orang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan. Kegiatan Pelatihan untuk meningkatkan SDM Nelayan tidak terlaksana karena anggaran difocusing untuk dialihkan ke Pandemi COVID -19 .
  - b. Kegiatan pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap dengan indikator Kegiatan Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan 12 KUB dan yang memperoleh pendampingan/penguatan kelembagaan sebanyak 29 KUB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.075.225.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.069.277.000 atau 99,45 %.
  - c. Kegiatan Pengembangan UPTD,Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.053.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.983.500 atau 99,46 % dengan Indikator kegiatan Jumlah Operasional Pengelolaan UPTD dalam pengelolaan TPI adalah 1 kegiatan.
  - d. Pembinaan Pendampingan dan Pencatatan Kapal Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.350.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.350.000 atau 100%. Indikator kegiatan adalah Jumlah Penerbitan, Pencatatan, pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebanyak 111 kapal. Indikator kinerja ini tidak tercapai disebabkan karena anggaran difocusing .
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.344.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.344.300 atau 100 % .

Program ini didukung dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.944.300 dan realisasi sebesar Rp. 55.944.300 atau 100% indikator kegiatan yaitu Jumlah Nelayan terpasilitasi dengan mitra

sebanyak 25 orang, realisasi kinerja 50 orang sehingga persentase nelayan yang terfasilitasi dengan mitra 200 %.

- b. Kegiatan Pembinaan Izin Usaha Pembudidaya Ikan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.1.650.000 dan realisasi keuangan Rp. 1.650.000 atau 100%. Indikator Kegiatan Jumlah Rekomendasi Penerbitan Ijin Usaha Pembudidayaan Ikan yang terpasilitasi sebanyak 2 Rekomendasi realisasi 1 rekomendasi atau 50 %.hal ini terjadi karena Pola pikir pembudidaya untuk mengambil ijin usaha masih sangat rendah kemungkinan disebabkan karena belum adanya sanksi yang membuat efek jera bagi pelaku usaha .
- c. Kegiatan Pembinaan Pembudidaya Ikan Skala kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.750.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.750.000 atau 100%. indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Penerbitan /pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dan Pengangkutan ikan hidup sebanyak 50 rekomendasi realisasi 50 rekomendasi atau capaian 100 %.

3. Program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.1.844.672.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.837.808.000 atau 99,63 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.p.5.350.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.350.000 atau 100%.,Indikator kegiatan Jumlah Pokdakan yang memperoleh pendampingan /penguatan kelembagaan target 10 pokdakan.realisasi kinerja sebanyak 49 pokdakan atau 490 %.
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.639.203.740 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.631.781.990 atau 100%. Indikator kinerja adalah jumlah pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan penerapan CBIB target 20 pokdakan realisasi kinerja 42 pokdakan atau 210 %.
- c. Kegiatan Pengembangan UPTD Pembinaan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 43.886.000 dan realisasi sebesar Rp.43.851.000 atau 99,92 % .Indikator kegiatan adalah Jumlah Benih Ikan air Tawar yang diproduksi target 671.650 ekor.realisasi 517.750 ekor atau 76,32 %.hal ini disebabkan karena kurangnya permintaan bibit bagi pembudidaya akibat pandemic COVID 19

- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.550.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.550.000 atau 100% . Indikator kegiatan adalah Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi dengan mitra dengan target 30 pembudidaya realisasi 83 pembudidaya atau 276,67 %
  - e. Kegiatan Pembinaan Sumberdaya manusia ,Pembudidaya,Pengolah dan Pemasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.900.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.900.000 atau 100%. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pembudidaya yang mengikuti penguatan SDM dengan target 30 orang.realisasi kegiatan tidak terlaksana karena anggaran difocusing untuk dialihkan ke pandemic COVID – 19.
  - f. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan ikan dan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.950.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.950.000 atau 100%.Indikator kegiatan adalah Jumlah Pemantauan Lokasi kesehatan ikan dan lingkungan perikanan target 10 Kecamatan realisasi 5 kecamatan atau 50 %., kegiatan ini tidak terlaksana akibat refocusing anggaran.
4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut,air payau dan air tawar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 777.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.776.667.000 atau 99,89 % dan realisasi Fisik 100% dengan didukung oleh kegiatan : Kajian Kawasan Budidaya Laut dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan dan penataan pengembangan kawasan berbasis klustetr sebanyak 1 Dokumen dan Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun sebanyak 4 paket.realisasi 5 paket atau 125 %

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

Capaian kinerja dan anggaran Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 3.7.Pencapaian Kinerja dan Anggaran per sasaran Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	49.112,29	49,604,46	100,002	1.095.353.500	1.089.335.500	99,45
Perikanan	Jumlah nelayan yang terlatih	30	0		3.725.000	3,725.000	100
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dan penguatan kelembagaan	8	12	125	1.075.3225.000	1.069.177.000	99,45
	Jumlah operasional UPTD dalam pembinaan dan pengelolaan TPI	1	1	100	13.053.500	12.983.500	99,46
	Jumlah pencatatan,pendaftaran,dan penandaan kapal perikanan	295	111	37,63	3.350.000	3.350.000	100
	Jumlah nelayan yang terfasilitasi dengan mitra	25	50	200	55.944.300	55.944.300	100
	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha pembudidaya ikan yang terfasilitasi	2	1	50	1.650.000	1.650.000	100
	Jumlah rekomendasi pencatatan usaha pembudidayaan ikan dan pengangkut ikan hidup	50	50	100	2.750.000	2,750.000	100
	Jumlah pokdakan yang memperoleh pendampingan/ penguatan kelembagaan	10	49	490	35.350.000	35.350.000	100
	Jumlah pokdakan yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan penerapan CBIB	20	42	210	1.738.036.000	1.738.207.000	99,61
	Jumlah benih ikan air tawar yang di produksi	678.367	517.750	76,32	43.886.000	43.851.000	99,92
	Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi dengan mitra	30	83	276,67	11.550.000	11.550.000	100
	Jumlah pembudidaya yang mengikuti penguatan SDM	30	0	-	2.900.000	2.900.000	100
	Jumlah kecamatan lokasi pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan	10	5	50	5.950.000	5.950.000	100

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020

	perikanan						
	Jumlah dokumen perencanaan dan penataan kawasan berbasis kluster	1	1	100	777.500.000	776.667.000	99,89
	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan di kawasan budidaya	4	5	125			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan kelautan dan perikanan	Hasil evaluasi sapip oleh Apip	B	-		941.535.500	929.961.007	98,8

Berdasarkan tabel tersebut di atas Realisasi Anggaran menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja program Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2020 secara umum terlaksana sesuai dengan target bahkan ada yang melebihi/peningkatan dari target yang telah ditetapkan.

### PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI

Secara umum permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Lemahnya kemampuan pelaku usaha dibidang kenelayan dalam kemandirian berwirausaha
2. Rendahnya kemampuan berwirausaha bagi pembudidaya ikan secara berkelanjutan
3. Rendahnya legalitas berusaha bagi usaha perikanan

Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembinaan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan.
2. Perlunya penerapan untuk melaksanakan potensi kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan secara maksimal.
3. Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan SDM nelayan dan pembudidaya

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kab Bone diarahkan pada peningkatan produksi. Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mendapat tantangan dan perubahan disegala bidang yang menuntut kerja keras dan kesungguhan stakeholder perikanan untuk dapat mengelola sumberdaya tersebut secara berkelanjutan.

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam LKjIP Tahun 2020 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2020 ada yang mencapai target da nada yang tidak mencapai target akibat karena terjadi refocusing anggaran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone

LKjIP bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone juga mempunyai makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone. Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung bukan hanya pencapaian Tahun 2020 namun melihat pencapaian dari tahun sebelumnya yang kontribusinya untuk pencapaian target akhir renstra.

Dari Evaluasi dan Analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangun mencapai target dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan. . Upayah ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja sebagai bagian dari kebijakan strategis khususnya dalam Renstra 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2020 yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggaran.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bone diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan Dokumen perencanaan Periode yang akan datang.